



PRESS RELEASE

Era New Normal : Upaya Pemerintah dan Swasta Capai SDGs untuk Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta, 9 Juli 2020 – Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia membawa dampak besar tidak hanya di sektor ekonomi namun juga di sosial. Dalam keterangan resminya, PBB menyatakan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada permulaan dekade aksi ini diperkirakan mempengaruhi semua segmen populasi khususnya merugikan anggota kelompok sosial yang paling rentan, termasuk orang yang hidup dalam situasi kemiskinan, orang lanjut usia, penyandang cacat, pemuda, dan *indigenous people*. Walhasil pencapaian agenda pembangunan dunia lewat Sustainable Development Goals (SDGs) terancam terhambat. Jika tidak ditangani dengan tepat, krisis sosial yang diciptakan oleh pandemi COVID-19 ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan, pengecualian, diskriminasi, dan pengangguran global dalam jangka menengah dan panjang.

Untuk meningkatkan kesadaran dan membahas persoalan potensi dampak sosial yang terjadi di Indonesia, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCS) kembali mengadakan Webinar kali ini bertema “*NO ONE LEFT BEHIND, Private Sector and Government Synergy for Social Welfare*” pada Kamis, (9/7/2020).

Sihol Aritonang, Chairman IBCSD menyatakan untuk mencapai SDGs dengan berpegang pada prinsip “No One Left Behind”, sektor bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pemerataan sosial.

Di era new normal ini, menurut Sihol, kepemimpinan dan aksi kolektif sektor bisnis sangat dibutuhkan dalam pemulihan dampak sosial mengingat sejumlah kelebihan yang dimilikinya seperti penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, inovasi dan investasi. Sektor bisnis juga dapat berperan untuk mengatasi dampak negatif pada lingkungan dan sosial melalui rantai nilai dan rantai pasok operasi bisnis mereka.

“Tujuan global “No One Left Behind” dapat tercapai apabila semua pihak terlibat termasuk sektor swasta, berkontribusi bersama mencapai tujuan SDGs. IBCSD akan terus berkolaborasi dan memohon arahan pemerintah, termasuk Kementerian Sosial dan Bappenas agar bisa terus berperan aktif dalam memajukan agenda global dan mendorong pemerataan sosial,” ujar Sihol saat memberikan sambutan.

Kolaborasi antara bisnis dan pemerintah menurut Menteri Sosial Juliari Batubara dapat dilakukan melalui dukungan terhadap strategi Penanggulangan Kemiskinan dengan dukungan pada implementasi

program Bantuan Stimulan Untuk Usaha yang dapat diakses oleh masyarakat, diantaranya KUBE dan Kewirausahaan Sosial maupun skema pendanaan lainnya untuk Pengembangan Usaha seperti Pusat Investasi Pemerintah, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ultra Mikro, PNM Mekaar dan sebagainya.

“Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kerangka kebijakan yang mendukung adanya kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial secara non tunai melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyaluran program bantuan sosial dilaksanakan secara non tunai, begitupun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Potensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan”, ujar Juliari Batubara dalam pidato kuncinya.

Sejumlah aksi telah dilakukan swasta selama ini dalam mencapai kesejahteraan sosial yang sejalan dengan pencapaian SDGs. Pada sektor keuangan, perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dapat memainkan peranan yang penting seperti yang dilakukan oleh Bank negara Indonesia (BNI) dengan Gerakan Ayo Menabung dengan Bank Sampah.

Dalam paparannya, VP Consumer Funding BNI Rizwan Nazaruddin mengatakan Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah merupakan kelanjutan dari pilot project yang telah berlangsung sejak tahun 2018 di kota administratif Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Hingga September 2019, gerakan ini sudah diikuti lebih dari 150.000 siswa serta 5.000 warga dan pasukan orange, lebih dari 200 bank sampah dengan total dana hasil penjualan yang telah dihimpun mencapai lebih dari Rp 3 miliar.

Contoh lainnya yaitu program School Improvement dari produsen pulp dan kertas, Grup APRIL yang bertujuan memperbaiki kualitas maupun infrastruktur sekolah dalam mencapai tujuan SDGs#4 Pendidikan yang Berkualitas. Dengan program ini, masyarakat di sekitar wilayah perusahaan beroperasi tetap akan mendapatkan akses pendidikan yang layak di tengah pandemi berlangsung.

Webinar *series* yang digelar IBCSD ini juga diisi oleh beberapa pembicara lain seperti: Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN / Bappenas; Ageng Herianto, Deputi Direktur FAO Indonesia; serta Glenn Pardede, Presiden Direktur PT East West Seed Indonesia (Cap Panah Merah). Turut hadir Prof. Bambang Shergi Laksmono, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia; serta petani muda Cecep Saepul Milah sebagai penanggap.

Rangkaian webinar IBCSD untuk pencapaian SDG di era new normal yang dimulai pada bulan Juni lalu akan berlangsung hingga Agustus. Webinar berikutnya akan digelar pada tanggal 30 Juli mendatang untuk membahas pilar ekonomi dan pilar lingkungan pada 13 Agustus.

CP: Katrina 081290088862